

**REPRESENTASI PERAMPASAN
HAK HIDUP INDIVIDU YANG DIANGGAP TAPOL
DALAM NOVEL *MENCoba TIDAK MENYERAH*
KARYA YUDHISTIRA ANM MASSARDI**

Bangga Pramesti
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, FPBS, UPI
bangga_108@yahoo.com

Abstrak

Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan tentang perampasan hak hidup individu yang dianggap tapol. Dengan demikian diperlukan penelitian terhadap novel *Mencoba Tidak Menyerah Karya Yudhistira ANM Massardi* ini. Untuk menjawab penelitian ini peneliti menggunakan teori hegemoni Gramsci. *Aku* merupakan tokoh utama dalam novel ini. Tokoh *Aku* menjadi korban akibat salah satu keluarganya dituduh sebagai simpatisan PKI. Keadaan ini membuat keluarga *Aku* menjadi susah, tidak nyaman, dan kondisi ekonomi keluarganya pun berubah. Keadaan ini memang nyata apa adanya, bahkan hingga sekarang orang-orang yang diduga termasuk simpatisan mendapatkan perlakuan berbeda. Keadaan inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan hak hidup sebagai individu. Mereka dikucilkan dari lingkungan bahkan ada yang dibunuh karena diduga terlibat dengan peristiwa-peristiwa G 30 S. Mereka yang dianggap simpatisan tidak mendapatkan perlakuan hukum sebagai mana mestinya.

Kata Kunci: Representasi, Perampasan Hak Hidup, Individu, Tapol, Hegemoni Gramsci.

PENDAHULUAN

Banyak karya sastra yang menjadi cerminan kehidupan sekelompok masyarakat. Cerminan kehidupan yang terdapat pada karya sastra sebagai contoh dapat kita lihat pada karya sastra yang mengangkat tema-tema sosial. Tema sosial ini banyak sekali diangkat oleh para pengarang. Khususnya, perampasan hak-hak hidup menjadi hal yang amat krusial dalam kehidupan manusia modern. Sastra sebagai sarana menangkap gejala kehidupan pun mengangkat permasalahan ini sebagai sentral pencitraan. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Chernyshevsky (dalam Plekhanov: 2006) bahwa karya seni berfungsi untuk mereproduksi kehidupan dan melakukan penilaian atas gejala-gejalanya.

Contohnya dalam karya Yudhistira ANM Massardi menceritakan bagaimana nasib seseorang yang dianggap terkait dalam jaringan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu. Seperti kita ketahui bersama, terdapat beragam versi mengenai teori atau sejarah tentang peristiwa ini. Pertama, versi dari pemerintahan yang mengatakan bahwa PKI telah melakukan percobaan kudeta pada peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 (GESTAPU) (bisa di-*Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948-1965* diterbitkan oleh

LSIK). Versi kedua—yang dikemukakan oleh beberapa pakar sejarawan seperti Jhon Rossa untuk menyebut beberapa nama sejarawan yang konsen akan peristiwa ini—yang mengemukakan sebaliknya bahwa tidak ada peristiwa pemberontakan yang terjadi dalam peristiwa tersebut.

Akan tetapi, dari berbagai versi yang dikemukakan tersebut, ada satu hal yang paling penting dan kerap dilupakan, yakni orang-orang yang tidak tahu-menahu akan peristiwa tersebut namun selalu dikaitkan dan mendapat berbagai penderitaan akibat peristiwa itu. Inilah yang diangkat dalam novel *Mencoba Tidak Menyerah* karya Yudhistira ANM Massardi. Novel ini menceritakan bagaimana nasib seseorang yang dianggap terlibat (atau dekat) dengan kelompok PKI. Dampak yang ditimbulkan sungguh besar. Tidak hanya terhadap diri pribadi, tetapi keluarga dan orang-orang terdekat pun merasakan hal yang sama.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian strukturalisme adalah sebuah pendekatan karya sastra yang berorientasi objektif. Di mana kajian yang dilakukan adalah menganggap sebuah karya sastra secara otonom. Karya sastra berdiri sendiri tanpa melihat hal-hal yang ada di luar karya sastra. Hal ini disebabkan kaum strukturalis berpendapat bahwa karya sastra dapat memaknai dirinya sendiri secara otonom.

Kajian strukturalisme berangkat dari pandangan bahwasannya karya sastra merupakan sebuah dunia yang dibangun atas struktur-struktur yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain (Heru, 2009: 64). Setelah melalui kajian strukturalisme masuklah kepada tahapan kajian hegemoni.

Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *lawenforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata Negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara.

Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni di mana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan di sisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan yuridis (Gramsci, 1971).

Lebih jauh dikatakan Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan “dominasi”. Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun, hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini

akan melengapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan “*hegemoni*”. Dengan demikian supremasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara, yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (*konsensus*), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Nyoman Kutha (2008:46) metode kualitatif, yaitu memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Dalam penelitian ini, karya sastra akan dilibatkan beserta lingkungan sosial, termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Metode ini disajikan dalam bentuk deskripsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan perampasan hak hidup seorang tapol. Bahan pustaka berupa hasil pengamatan, pemikiran, serta data-data dari media cetak dan media elektronik.

Sumber data yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah novel *Mencoba Tidak Menyerah* karya Yudhistira ANM Massardi. Novel *Mencoba Tidak Menyerah* di terbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya dan merupakan cetakan pertama pada bulan Oktober 1996.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila melihat peristiwa pada tahun 1965 yang menjadi latar waktu dalam novel *Mencoba Tidak Menyerah* karya Yudhistira ANM Massardi, terdapat salah satu hak individu yang dilanggar. Hak individu itu adalah hak untuk hidup. Salah satu acuan untuk mengetahui sejauh mana hak individu itu di langgar, dapat diketahui dalam (1) Undang-Undang Dasar 1945 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kembali lagi kepada novel, senada dengan fakta diatas banyak kejadian penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI dan para simpatisannya, Bahkan orang-orang yang tidak tahu menahu bisa menjadi korban. Kemungkinan besar tokoh Bapak meninggal akibat dibunuh oleh orang-orang yang menduga bahwa bapak adalah PKI. Sampai akhirnya tokoh Bapak tidak bisa diketemukan lagi dan semua anggota keluargapun pasrah menerima kehilangan tokoh Bapak yang hilang entah keman.

Setelah tokoh Bapak diduga sebagai simpatisan PKI tokoh *Aku* merasakan bagaiman Hak-hak sebagai warga Negara bahkan hak sebagai seorang anak dirampas. Tokoh *Aku* tidak merasakan ketidak nyamanan tempat tinggal dan penghunian yang layak, Pekerjaan, rasa aman, hak sebagai seorang anak dan bahkan yang paling menyakitkan ia merasa dikucilkan oleh lingkungannya mulai dari kehidupan masyarakat hingga dunia sekolah karena orang-orang menduga

bahwa ia adalah seorang anak PKI. Padahal tokoh aku tidak terlibat dengan PKI. Ia hanya seorang anak dari seorang bapak yang di duga seorang simpatisan PKI.

Apabila dilihat dari sebelum kejadian G 30 S, salah satu bentuk hegemoni yang muncul dalam novel ini adalah munculnya ormas, orpol, dan surat kabar. Pers merupakan media yang sangat menguntungkan dalam hal propaganda. Pers dan ormas menjadi sarana yang cukup ampuh dalam menyebarkan propaganda dan isu-isu. Setelah lewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ada enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Ada sebuah isu yang tak kalah penting dengan peristiwa G 30 S tetap isu ini berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu isu Dewan Jendral. Isu yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Pamor PKI pun setelah kejadian G 30 S menjadi buruk dicitra masyarakat. Pers dalam hal ini RRI di Jalan Merdeka barat menjadi sarana untuk menyebarkan berita dan isu-isu tersebut terhadap masyarakat luas. Selain dengan menggunakan berita yang berimbas pada empati masyarakat, kepada para petinggi Angkatan Darat yang dibunuh dan dituduhkan terhadap PKI.

Dengan demikian, masyarakat akan memiliki nilai-nilai dan moral untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya wajar dan lumrah terhadap apa yang dilakukan mereka, tetapi mereka tidak merasa bersalah, karena norma yang berkembang pada saat itu membuat perilaku salah menjadi benar. Selain itu proses pralihan rezim ini tidak hanya melalui proses menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual namun ada peran lain yang berperan aktif dalam proses perebutan kekuasaan ini. Yaitu dengan bantuan militer. Melalui kekuatan militer banyak sekali orang-orang yang dianggap simpatisan PKI dimasukkan penjara tanpa diadili. Stigma terhadap orang-orang yang dianggap PKI sehingga keluarganya dikucilkan dari kehidupan sosial bahkan mereka kesulitan dalam memperoleh pengakuan dari negara.

Dalam novel ini pun diceritakan bagaimana kejadian setelah bapak dari tokoh *Aku* dituduh dan dibawa ke KODIM dan dipenjarakan karena dituduh simpatisan PKI. Setelah Era beralih dari Soekarno ke rezim Soeharto. Perpindahan rezim ini terasa mengandung unsur hegemoni karena, seperti telah kita ketahui proses hegemoni Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual.

SIMPULAN

Representasi yang jelas dapat kita ketahui pada novel ini ialah mengenai perampasan hak hidup individu yang dianggap tapol. Bentuk representasi dari itu semua kita ketahui melalui tokoh-tokohnya. Apabila melihat peristiwa dan tokoh pada tahun itu, bentuk representasi hak individu yang jelas dilanggar adalah tokoh *Aku* beserta keluarga yang lain merasakan ketidak nyamanan tempat tinggal dan

penghunian yang layak, sulit mendapatkan pekerjaan, rasa aman, hak sebagai seorang anak dan bahkan yang paling menyakitkan ia merasa dikucilkan oleh lingkungannya mulai dari kehidupan masyarakat hingga dunia sekolah karena orang-orang menduga bahwa ia adalah seorang anak PKI. Padahal, tentang hak hidup telah jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.

Hegemoni muncul pada latar waktu di tahun 1965 s/d 1966. Untuk mengidentifikasinya latar waktu ditahun tersebut menjadi titik sentral yang sangat kuat dalam novel ini. Selain itu dengan adanya tokoh dan penokohan, munculnya ORMAS, ORPOL, surat kabar, ideologi pemimpin yang berkuasa, dan kekuatan militer, dapat mengidentifikasi pula adanya proses hegemoni dalam novel *Mencoba Tidak Menyerah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Gramsci, Antonio. 2001. *Catatan-Catatan Politik*. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawan, Heru. 2009. *Sastra Anak dalam Kajian Strukturalisme, Sosiologi, Semiotika Hingga Penulisan Kreatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Massardi, Yudistira ANM. 1966. *Mencoba Tidak Menyerah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Plekhanov. 2006. *Seni dan Kehidupan Sosial*. Bandung: Penerbit Ultim.